

**HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PROGRAM USAHA  
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)  
DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KELOMPOK DI  
KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-  
syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh :**

**Isnaini Yuni Mawarti**

**NIM. 15250074**

**Pembimbing :**

**Abidah Muflihati, S. Th. I., M. Si**

**NIP. 19770317 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-959/Un.02/DD/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KELOMPOK DI KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNAINI YUNI MAWARTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15250074  
Telah diujikan pada : Senin, 07 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5fb3d17d7b766



Penguji II

Drs. H. Suisyanto, M.Pd  
SIGNED

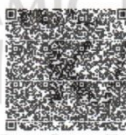
Valid ID: 5fb398194bdf



Penguji III

Aryan Torrido, SE., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5fb35a4079905



Yogyakarta, 07 September 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 5fb4a2b791d8e



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
Email: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Isnaini Yuni Mawarti  
NIM : 15250074  
Judul Skripsi : Hubungan Antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi



Siti Rochah, S. Sos. I., M. Si.  
19830519 200912 2 002

Abidah Muflihah S. Th. I., M. Si.  
NIP. 19770317 2006042 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini Yuni Mawarti  
NIM : 15250074  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Hubungan Antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan sesuai ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Isnaini Yuni Mawarti  
NIM. 15250074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Dengan menyebut nama Allah SWT, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini Yuni Mawarti  
NIM : 15250074  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menerima resiko apapun yang berkaitan dengan pemakaian foto berjilbab pada Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka saya bersedia menanggung resikonya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Isnaini Yuni Mawarti  
NIM. 15250074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**“Skripsi yang baik adalah Skripsi yang selesai”**

**-Arin Mamlakah Kalamika S. Sos., M.A.-**

**(Kalimat yang diucapkan Ibu Arin saat mata kuliah Advokasi Sosial**

**semester ganjil tahun akademik 2017/2018)**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan Antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dan menuntun kita menuju jalan kebenaran dan kebaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian ini.
3. Ibu Siti Solechah S. Sos. I., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
4. Ibu Noorkamilah, S. Ag, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan.

5. Ibu Abidah Muflihah, S. Th. I, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan.
7. Bapak Darmawan selaku staff Program Ilmu Kesejahteraan Sosial yang senantiasa membantu dan melayani penulis dengan penuh keramahan dan kesabaran.
8. Kedua orang tua tercinta atas limpahan doa, cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, serta pengorbanannya selama ini yang tidak akan pernah bisa terbalaskan.
9. Kakak saya atas doa, dukungan, dan perhatiannya.
10. Keluarga besar saya atas doa dan dukungannya.
11. Semua teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2015 yang saling membantu, memotivasi, dan mendukung penulis. Semoga dimudahkan dalam segala urusan.
12. Bapak Sukanto AKS yang selalu memotivasi serta mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Agus Sri Wibowo A.md, Ibu Dra. Kismi Darwati, Ibu Angelia Dewi Candra S. Sos, selaku PLKB Kecamatan Ngemplak yang telah bersedia memberikan informasi mengenai Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan

Ngemplak serta telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.

14. Seluruh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Ngemplak yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

15. Teman-teman Pusat Informasi dan Konseling Remaja Semarak Kecamatan Ngemplak yang telah memberikan ilmunya selama penulis berorganisasi di Kecamatan.

16. Teman-teman Karang Taruna Bima Putra Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak memberikan ilmunya selama penulis berorganisasi di Desa.

17. Ibu Irene Kartika selaku Pembimbing Kumon Jalan Kaliurang KM 7.2 yang telah memberikan izin tidak masuk kerja selama perkuliahan.

18. Teman-teman Staff Kumon Jalan Kaliurang KM 7.2, Miss Anisa Dian Safitri S. Pd, Miss Endang Lestari S. Pd, Miss Miftahul Jannah, Miss Puji Lestari, Miss Meti Evandari, Miss Eyllen Mauluddany S. H yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, serta doa kepada penulis.

19. Teman-teman terdekat saya Zyorisa Tamara Tesa S. Sos, Suli Praminta Sari S. Pd, Dita Dwi Ambar Sari A. Md., Ufiya Ajdar S.E., Laely Fitra Tama S. Pd, Anindita Ayunisa Utami S. Pd.,

Rafika Intan yang telah membantu dalam segala hal kepada penulis.

20. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Terima kasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Penulis,

Isnaini Yuni Mawarti  
NIM. 15250074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Isnaini Yuni Mawarti, 15250074, Hubungan Antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Skripsi: Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Teori yang digunakan yaitu, teori Korten yang menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan Pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. *Kedua*, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. *Ketiga*, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Data penelitian dikumpulkan dengan dua cara terhadap 80 responden, yaitu pada pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu  $0.000 < 0.05$  serta  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ .  $t \text{ hitung}$  dalam penelitian ini adalah 0.448 lebih besar dari  $t \text{ tabel}$  yaitu, 0.220.

*Kata Kunci: Program UPPKS, Tingkat Kesejahteraan, Anggota Kelompok*

## DAFTAR ISI

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i     |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | ii    |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....         | iii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | iv    |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....        | v     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | v     |
| MOTTO .....                             | vi    |
| KATA PENGANTAR .....                    | vii   |
| ABSTRAK .....                           | xi    |
| DAFTAR ISI .....                        | xii   |
| DAFTAR TABEL .....                      | xv    |
| DAFTAR GAMBAR .....                     | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 8     |
| D. Kajian Pustaka .....                 | 9     |
| E. Landasan Teori .....                 | 17    |
| F. Hipotesis Penelitian .....           | 38    |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 38    |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>                  | <b>40</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....                             | 40         |
| B. Lokasi Penelitian .....                            | 41         |
| C. Variabel Penelitian.....                           | 41         |
| D. Definisi Konseptual .....                          | 42         |
| E. Definisi Operasional .....                         | 46         |
| F. Populasi dan Sampel .....                          | 49         |
| G. Teknik Sampling .....                              | 51         |
| H. Instrumen Penelitian.....                          | 51         |
| I. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 53         |
| J. Validitas dan Reliabilitas .....                   | 55         |
| K. Analisis Data .....                                | 60         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGEMPLAK .....</b> | <b>62</b>  |
| A. Alur Penelitian.....                               | 62         |
| B. Profil Kecamatan Ngemplak.....                     | 65         |
| C. Karakteristik Responden.....                       | 74         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>              | <b>80</b>  |
| A. Analisis Data Deskriptif .....                     | 80         |
| B. Uji Normalitas .....                               | 114        |
| C. Uji Linearitas .....                               | 114        |
| D. Uji Hipotesis .....                                | 115        |
| E. Pembahasan Hasil Penelitian .....                  | 117        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                            | <b>119</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan.....         | 119        |
| B. Saran .....             | 120        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>119</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1</b> Jumlah Penduduk Miskin Antara Desa dan Kota di Indonesia Tahun 2015-2019 ..               | 2  |
| <b>Tabel 2</b> Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2019 .....                          | 2  |
| <b>Tabel 3</b> Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2019 .....        | 3  |
| <b>Tabel 4</b> Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN .....                                  | 35 |
| <b>Tabel 5</b> Klasifikasi Indikator Keluarga Sejahtera Menurut Koelle .....                             | 37 |
| <b>Tabel 6</b> Informasi Mengenai Definisi Operasional .....                                             | 46 |
| <b>Tabel 7</b> Penentuan Skor Variabel X dan Y .....                                                     | 52 |
| <b>Tabel 8</b> Instrumen Variabel Program UPPKS .....                                                    | 53 |
| <b>Tabel 9</b> Instrumen Variabel Tingkat Kesejahteraan Anggota Keluarga .....                           | 53 |
| <b>Tabel 10</b> Hasil Uji Validitas Variabel Program UPPKS .....                                         | 56 |
| <b>Tabel 11</b> Instrumen Variabel Program UPPKS Setelah Uji Validitas .....                             | 57 |
| <b>Tabel 12</b> Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok .....                | 57 |
| <b>Tabel 13</b> Instrumen Variabel Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok Setelah Uji Validitas .....    | 59 |
| <b>Tabel 14</b> Uji Reliabilitas Variabel Program UPPKS dan Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok ..... | 60 |
| <b>Tabel 15</b> Luas Wilayah Kecamatan Ngemplak .....                                                    | 66 |
| <b>Tabel 16</b> Susunan Pejabat Struktural dan Staff Kecamatan Ngemplak .....                            | 70 |
| <b>Tabel 17</b> Susunan Pejabat Penyuluh Layanan Keluarga Berencana .....                                | 72 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabel 18</b> Daftar Nama Kelompok UPPKS di Kecamatan Ngemplak .....               | 73  |
| <b>Tabel 19</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia .....                          | 74  |
| <b>Tabel 20</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompok UPPKS ..... | 75  |
| <b>Tabel 21</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha .....                   | 76  |
| <b>Tabel 22</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelurahan .....                     | 76  |
| <b>Tabel 23</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin .....                 | 77  |
| <b>Tabel 24</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....           | 77  |
| <b>Tabel 25</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Pernikahan .....             | 78  |
| <b>Tabel 26</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....               | 79  |
| <b>Tabel 27</b> Kategori Indikator Tujuan Kegiatan .....                             | 83  |
| <b>Tabel 28</b> Kategori Indikator Kegiatan .....                                    | 86  |
| <b>Tabel 29</b> Kategori Indikator Aturan dan Prosedur .....                         | 88  |
| <b>Tabel 30</b> Kategori Indikator Anggaran .....                                    | 91  |
| <b>Tabel 31</b> Kategori Indikator Strategi Pelaksan.....                            | 94  |
| <b>Tabel 32</b> Kategori Indikator Evaluasi Program .....                            | 97  |
| <b>Tabel 33</b> Kategori Variabel Program UPPKS.....                                 | 100 |
| <b>Tabel 34</b> Kategori Indikator Aspek Materi .....                                | 102 |
| <b>Tabel 35</b> Kategori Indikator Aspek Fisik .....                                 | 105 |
| <b>Tabel 36</b> Kategori Indikator Aspek Mental .....                                | 108 |
| <b>Tabel 37</b> Kategori Indikator Aspek Spiritual .....                             | 110 |
| <b>Tabel 38</b> Kategori Variabel Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok .....       | 113 |
| <b>Tabel 39</b> Hasil Uji Normalitas .....                                           | 114 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>Tabel 40</b> Hasil Uji Linearitas ..... | 114 |
| <b>Tabel 41</b> Hasil Uji Hipotesis .....  | 116 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1</b> Peta Kecamatan Ngemplak.....                  | 66 |
| <b>Gambar 2</b> Struktur Kepengurusan Kecamatan Ngemplak..... | 69 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup> Menurut Bradley R. Schiller, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global. Isu kemiskinan tidak hanya ada di negara berkembang saja, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Perserikat Bangsa-Bangsa, angka penduduk miskin di negara ini mencapai 12% dari total populasi pada tahun 2018.<sup>3</sup>

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus.<sup>4</sup> Di Indonesia, jumlah penduduk miskin antara kota dan desa dari bulan Maret tahun 2015 sampai bulan September tahun 2019 mengalami penurunan. Berikut data jumlah penduduk miskin antara desa dan kota menurut Badan Pusat Statistik:

---

<sup>1</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. XI.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, cet 1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 1.

<sup>3</sup> <https://www.inews.id/finance/makro/tingkat-kemiskinan-di-as-capai-12-persen-bagaimana-dengan-indonesia> diakses 1 Oktober 2020.

<sup>4</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Cet 5 (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 131.

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Miskin Antara Desa dan Kota di Indonesia Tahun 2015-2019

| Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota di Indonesia (Ribuan Jiwa) |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tahun                                                           | Bulan     | Jumlah    |
| 2015                                                            | Maret     | 28 592,79 |
|                                                                 | September | 28 513,57 |
| 2016                                                            | Maret     | 28 005,39 |
|                                                                 | September | 27 764,32 |
| 2017                                                            | Maret     | 27 771,22 |
|                                                                 | September | 26 582,99 |
| 2018                                                            | Maret     | 25 949,80 |
|                                                                 | September | 25 674,58 |
| 2019                                                            | Maret     | 25 144,72 |
|                                                                 | September | 24 424,02 |

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html> diakses 22 September 2020.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalami angka penurunan jumlah penduduk miskin, yaitu Provinsi Yogyakarta. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Yogyakarta dari bulan Maret tahun 2015 sampai bulan September tahun 2019 terus mengalami penurunan. Berikut data jumlah penduduk miskin Provinsi Yogyakarta menurut Badan Pusat Statistik:

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2019

| Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Yogyakarta (Ribuan Jiwa) |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 2015                                                     |           | 2016   |           | 2017   |           | 2018   |           | 2019   |           |
| Maret                                                    | September | Maret  | September | Maret  | September | Maret  | September | Maret  | September |
| 550.23                                                   | 485.56    | 494.94 | 488.83    | 488.53 | 466.33    | 460.10 | 450.25    | 448.47 | 440.89    |

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html> diakses 22 September 2020.

Provinsi Yogyakarta terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota. Salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Yogyakarta yaitu, Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman juga mengalami penurunan pada tahun 2016. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Berikut jumlah penduduk miskin di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Yogyakarta menurut Badan Pusat Statistik:

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2019

| No. | Nama Wilayah    | Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribuan Jiwa) |        |        |        |        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                 | 2015                                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| 1.  | DI Yogyakarta   | 550.23                                        | 494.94 | 488.53 | 460.10 | 448.47 |
| 2.  | Kulon Progo     | 88.13                                         | 84.34  | 84.17  | 77.72  | 74.62  |
| 3.  | Bantul          | 160.15                                        | 142.76 | 139.67 | 134.84 | 131.15 |
| 4.  | Gunung Kidul    | 155.00                                        | 139.15 | 135.74 | 125.76 | 123.08 |
| 5.  | Sleman          | 110.96                                        | 96.63  | 96.75  | 92.04  | 90.17  |
| 6.  | Kota Yogyakarta | 35.98                                         | 32.06  | 32.20  | 29.75  | 29.45  |

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/23/619/3/jumlah-penduduk-miskin-kab-kota.html> diakses 22 September 2020

Kabupaten Sleman terbagi menjadi tujuh belas Kecamatan. Salah satu Kecamatannya yaitu, Kecamatan Ngemplak. Jumlah kemiskinan di Kecamatan Ngemplak juga mengalami penurunan. Menurut data kemiskinan Kecamatan Ngemplak berdasarkan SK Bupati Sleman pada tahun 2017 jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1.598 KK. Pada tahun 2018 jumlah kepala keluarga miskin ada 1.414 KK. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1.406 KK. Terakhir pada tahun 2020 jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1.287 KK.

Melihat angka penurunan kemiskinan di atas, tentu tidak lepas dari berbagai macam kebijakan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh

Pemerintah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah kemiskinan.<sup>5</sup> Menurut Korten seperti yang dikutip oleh Yulianto Kadji menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan Pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. *Kedua*, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. *Ketiga*, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.<sup>6</sup>

Berikut beberapa program untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dll. Salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah di Indonesia, yaitu melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di bawah lembaga Pemerintah non kementerian yaitu, Badan Kependudukan dan Keluarga

---

<sup>5</sup>Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya”, <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, diakses tanggal 19 Mei 2019.

<sup>6</sup>*Ibid.*,

Berencana Nasional (BKKBN). Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera lewat berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif.<sup>7</sup> Keanggotaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi akseptor KB, Keluarga Prasejahtera (keluarga miskin), Keluarga Sejahtera I, dan keluarga lain yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia.<sup>8</sup>

Melihat teori Korten di atas, sesuai dengan program untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh BKKBN, melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS. *Pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan Pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan kebijakan adanya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.<sup>9</sup> Sebagai contoh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Mina Mandiri di Padukuhan Bokesan, menurut Ibu Sri Rejeki alasan membentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Mina Mandiri karena memiliki

---

<sup>7</sup>BKKBN, *Pembangunan Keluarga di Kampung KB* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), hlm. 42.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>9</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, *Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)*, (Yogyakarta: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), 2019), hlm. 74.

permasalahan bahwa banyak Ibu-ibu yang tidak bekerja dan hanya *ngerumpi* di rumah. Akhirnya Ibu Sri Rejeki berinisiatif membentuk kelompok tersebut. Awalnya kegiatan hanya simpan pinjam dan arisan, akan tetapi dengan berjalannya waktu kelompok tersebut berinisiatif membuat olahan yang berbahan dasar dari ikan air tawar.<sup>10</sup>

*Kedua*, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera memiliki struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi karena dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera pengurus kelompok harus dibentuk. Pembentukan pengurus kelompok inilah sebagai elemen dinamisator kelompok. Hanya dengan kelompok yang dinamis, penuh prakarsa, berdedikasi dan kaya gagasan, suatu pilihan kegiatan ekonomi produktif akan berpengharapan untuk maju serta berkembang.<sup>11</sup> Struktur organisasi kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta Seksi-seksi jika diperlukan.<sup>12</sup>

*Ketiga*, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial sesuai kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di masing-masing Padukuhan. Sebagai contoh Usaha Peningkatan Pendapatan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sri Rejeki, Ketua UPPKS Mina Mandiri, 26 Januari 2019.

<sup>11</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten...hlm. 38.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Keluarga Sejahtera Barokah di Padukuhan Malangrejo, melakukan produksi kerajinan rajut serta olahan makanan. Berbeda lagi dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Mina Mandiri yang melakukan produksi olahan makanan berbahan dasar ikan air tawar.

Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Ngemplak, dikarenakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di wilayah ini memiliki beberapa prestasi tingkat Provinsi atau Kabupaten. Tahun 2014 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Mina Mandiri di desa Sindumartani memperoleh juara 1 sebagai kelompok Usaha Peningkatan Penapatan Keluarga Sejahtera lingkup Provinsi Yogyakarta. Tahun 2015 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Megatera 20 yang terletak di desa Widodomartani memperoleh juara 3 tingkat Kabupaten Sleman. Tahun 2018 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Ngemplak memperoleh kembali juara 1 tingkat Provinsi yaitu, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Citra Sari desa Umbulmartani. Terakhir prestasi diperoleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Barokah desa Wedomartani sebagai juara 1 tingkat Kabupaten Sleman pada Tahun 2019.<sup>13</sup>

Selain prestasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Ngemplak, ada hal unik lainnya yaitu, Kecamatan Ngemplak pada tahun 2016 ditunjuk menjadi percontohan kampung KB se-Kabupaten Sleman, dimana Padukuah yang menjadi percontohan kampung KB adalah Padukuhan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Angelia, PLKB Kecamatan Ngemplak, 22 Mei 2019.

Malangrejo desa Wedomartani.<sup>14</sup> Padahal salah satu kriteria untuk menjadi kampung KB, yaitu: jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata KPS dan KS I tingkat Desa dimana Kampung tersebut berada.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu apakah ada hubungan antara program pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan terutama mengenai hubungan pelaksanaan program Usaha Peningkatan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kismi, PLKB Kecamatan Ngemplak, 22 Mei 2019

<sup>15</sup> BKKBN, *Pengelolaan Kampung KB* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), hlm. 7.

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi untuk program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama mata kuliah Penanggulangan Kemiskinan.

b. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sleman/Provinsi Yogyakarta/wilayah lain di Indonesia dalam membuat inovasi kebijakan dalam hal pengentasan kemiskinan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penulis akan melakukan penelitian mengenai hubungan antara program pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan kajian pustaka tentang penelitian sebelumnya sebagai tanggung jawab moral serta untuk menjamin keaslian penelitian, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Deni Kutut Megantara pada Tahun 2007 dengan judul “Hubungan Antara Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kab. Lumajang Tahun 2006.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti mengolah data penelitian menggunakan analisis korelasi *product moment*. Dimana hasil analisis data hubungan antara program pembinaan kesejahteraan keluarga dengan pelaksanaan program keluarga berencana diperoleh

nilai sebesar 0.666 yang menunjukkan nilai lebih besar dari nilai r tabel dengan N=50 taraf signifikansi 95% (0.279).<sup>16</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Intan Riana Dewi pada Tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka Di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kasubid pemberdayaan ekonomi keluarga, Penyuluh Layanan Keluarga Berencana (PLKB), pengurus dan anggota kelompok UPPKS SOKA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera terhadap kelompok SOKA di Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta menunjukkan ada yang berjalan dengan efektif, namun ada juga yang dikatakan belum efektif. Dalam program UPPKS dikatakan efektif ditandai masih adanya perputaran modal berjalan dengan lancar. Kemudian para anggota mendapatkan hasil keuntungan dari usaha masing-masing para anggota UPPKS. Program UPPKS dikatakan belum efektif pada pemahaman program mengenai akan maksud dan tujuan dibentuknya program UPPKS bagi para anggota UPPKS karena kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara program karena hanya melakukan sosialisasi dengan pihak pengurus saja.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Deni Kutut Megantara, *Hubungan Antara Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga dengan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kab. Lumajang Tahun 2006*, Skripsi (Jawa Timur: Program Studi Pendidikan Luarr Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2007).

<sup>17</sup>Intan Riana Dewi, *Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Heri Risal Bungkaes dkk pada tahun 2013 dengan judul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran skor variabel efektivitas pengelolaan program Raskin berada pada kelas interval 17 – 21 atau terkategori “sedang” atau menengah cenderung “tinggi”. Dengan demikian, hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan program Raskin belum optimal dilakukan. Hasil analisis tersebut sejalan dengan skor rata-rata variabel pengelolaan program Raskin, yakni sebesar 19,5 atau  $\pm$  78% dari skor ideal atau skor teoritiknya yakni 25 skor.<sup>18</sup>

Untuk sebaran skor variabel kesejahteraan RTM sebelum penyaluran Raskin berada pada kelas interval 25 – 31 dengan frekuensi sebanyak 33 responden atau sebesar 55% dengan kategori “sedang” cenderung “rendah” (40%), dan hanya 5% dari total responden yang diwawancarai, yakni sebanyak 60 orang terkategori “tinggi”. Sedangkan, sebaran skor variabel kesejahteraan RTM setelah penyaluran Raskin berada pada kelas interval 26 – 32 dengan frekuensi sebanyak 36 responden atau sekitar 60% cenderung “tinggi” (31,67%) dari total responden sebanyak 60 orang. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat Raskin berada pada kategori “sedang” atau cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan skor rata-rata tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat

---

<sup>18</sup>Heri Risal Bungkaes dkk, “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Journal Acta Diurna*, (April, 2013), hlm. 1.

raskin yang dicapai sebesar 30,9 atau sekitar 77,3% dari skor teoritiknya, yakni sebesar 40 skor.<sup>19</sup>

Dari hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai *chi-square* hubungan antara evektifitas pengelolaan program Raskin dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga penerima Raskin, yaitu  $\chi^2_{hitung} = 35,230$ . Berdasarkan hasil nilai *chi-square* tersebut selanjutnya dihitung nilai koefisien kontingensi untuk mengetahui tingkat keeratan (derajat) hubungan kedua variabel, dan diperoleh nilai  $KK = 0,62385$  kemudian dikonsultasikan dengan nilai maksimum daripada koefisien kontingensi = 0,8165 dan nilai  $\frac{1}{2} KK_{maks} = \frac{1}{2} (0,8165) = 0,4083$ . Hasil analisis data tersebut diinterpretasikan menjadi hasil analisis *chi-square* diperoleh  $\chi^2_{hitung} = 38,230$  sedangkan nilai *chi-square* kritik untuk taraf signifikan 0,01 dan derajat bebas  $(b-1)(k-1) = 4$  dari daftar distribusi *chi-square* di dapat  $\chi^2 = 13,3$ . Hal ini menunjukkan bahwa *chi-square* hasil penelitian jauh lebih besar dari *chi-square* kritik ( $38,230 > 13,3$ ). Dengan demikian, kedua variabel antara evektifitas pengelolaan program Raskin dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima Raskin mempunyai hubungan yang sangat signifikan atau sangat meyakinkan pada taraf uji 1% atau taraf kepercayaan 99%.<sup>20</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ika Pewista pada Tahun 2016 dengan judul “Hubungan Peran Kelompok Tani dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Lansia di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penentuan lokasi penelitian menggunakan *purposive sampling* di Kecamatan Temon. Hasil

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap peran kelompok tani sebagai unit belajar, unit kerjasama, dan unit produksi masuk dalam klasifikasi sedang. Analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga tani lansia menunjukkan 34,12% rumah tangga tani lansia di Kecamatan Temon masuk dalam kriteria rumah tangga sejahtera tinggi, 47,06% memiliki kesejahteraan sedang, dan 18,82% memiliki kesejahteraan rendah. Peran kelompok tani tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat kesejahteraan.<sup>21</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Khoirul Imrah pada Tahun 2018 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yaitu, penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukan bahwa program UPPKS yang diselenggarakan guna membantu ekonomi keluarga yang kurang mampu dalam meningkatkan hasil pendapatan mereka, diberi pendampingan-pendampingan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP dan PA) agar mampu mengembangkan usaha mereka. Kelompok UPPKS di Pekon Wates menjalankan usaha produksi kue adat Lampung, usaha tersebut mampu menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang semula hanya sejahtera I, saat ini telah mencapai sejahtera II.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ika Pewista, *Hubungan Peran Kelompok Tani dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Lansia di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Kependudukan Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2016).

<sup>22</sup> Khoirul Imrah, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit*

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Sudarmiani dan Waini Astuti pada Tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS di Desa Sukorejo ini berjalan cukup baik dalam kegiatan simpan pinjam. (2) Peran para kader UPPKS di Desa Sukorejo yaitu sebagai fasilitator dalam menyampaikan apa yang diinginkan oleh anggotanya kepada pihak penyelenggara program UPPKS. (3) Komponen-komponen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan UPPKS di Desa Sukorejo adalah Kelurahan Desa, PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Saradan, dan BKKBN. (4) Hambatan atau kendala dalam proses pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS di Desa Sukorejo yakni adanya anggota yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok UPPKS dan anggota yang pindah domisili sehingga anggota UPPKS menjadi berkurang.<sup>23</sup>

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aghnia Nurhusni dkk pada Tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga cukup berhasil dengan komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang baik pula sehingga memudahkan mencapai tujuan utama yakni

---

Kabupaten Lampung Barat, Skripsi (Lampung: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Intan, 2018).

<sup>23</sup> Sudarmiani dan Waini Astuti, “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”, *Journal Equilibrium Volume 7 Nomor 2*, (2 Juli 2019), hlm 116.

peningkatan pendapatan keluarga. Sementara dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik primer, sekunder, dan tersiernya sudah sangat terpenuhi sehingga ada peningkatan pendapatan keluarga setelah adanya kegiatan UPPKS.<sup>24</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang diuraikan penulis diatas, tentu ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Persamaan dengan penelitian *pertama*, yaitu sama-sama meneliti mengenai hubungan suatu program. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yang sama dengan penelitian pertama, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif.

Perbedaan dengan penelitian pertama, yaitu subjek yang penulis teliti mengenai anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada penelitian pertama, subjek penelitian yaitu, anggota PKK di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kab. Lumajang tahun 2016.

Persamaan dengan penelitian *kedua* yaitu, subjek penelitian sama-sama anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Perbedaan dengan penelitian kedua, yaitu penelitian kedua mengenai efektivitas program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), sedangkan penulis meneliti mengenai hubungan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap tingkat kesejahteraan anggota kelompok.

---

<sup>24</sup>Aghnia Nurhusni dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Volume 4 Nomor 1*, (1 Juni 2019), hlm. 6.

Perbedaan selanjutnya, yaitu pada penelitian kedua menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Selain itu, tempat yang digunakan pada penelitian kedua yaitu, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Soka di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta. Pada penelitian ini, penulis menggunakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Persamaan dengan penelitian *ketiga*, yaitu sama-sama meneliti mengenai hubungan suatu program dengan tingkat kesejahteraan. Persamaan lainnya, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ketiga, yaitu subjek yang digunakan peneliti rumah tangga miskin penerima manfaat program Raskin. Pada penelitian ini, penulis menggunakan subjek anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Persamaan dengan penelitian *keempat*, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Persamaan selanjutnya, yaitu sama-sama meneliti mengenai hubungan, akan tetapi di sini memiliki perbedaan. Perbedaannya, yaitu mengenai hubungan peran kelompok tani dengan tingkat kesejahteraan, sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti mengenai hubungan pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok.

Persamaan dengan penelitian *kelima*, yaitu sama-sama meneliti mengenai kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Perbedaan dengan penelitian *kelima* yaitu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Selain itu, pada penelitian ini bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Persamaan dengan penelitian *keenam*, yaitu sama-sama meneliti mengenai kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Perbedaan dengan penelitian *keenam* yaitu, jenis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Selain itu, pada penelitian ini bertempat di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Persamaan dengan penelitian *ketujuh*, yaitu sama-sama meneliti mengenai Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Perbedaan dengan penelitian *ketujuh* yaitu, penelitian *ketujuh* menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.

## E. Landasan Teori

### 1. *Grand Theory*

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan *grand theory* pembangunan dari Korten. Menurut Korten seperti yang dikutip oleh Yulianto Kadji menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan Pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. *Kedua*, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. *Ketiga*, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.<sup>25</sup>

Individu bukanlah sebagai objek, akan tetapi berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Pembangunan yang memihak rakyat, menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya, pembangunan seperti itu mementingkan sistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yulianto Kadji, "Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya", <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, diakses tanggal 19 Mei 2019.

<sup>26</sup> Ravik Karsidi, "Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal MEDIATOR Volume 2, Nomor 1*, (2001), hlm. 119.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan inti konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan diri berharga yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya, haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para anggotanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat.<sup>27</sup>

Model pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan. Model ini melihat masyarakat yang inisiatif kreatif sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual masyarakat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategi pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai masukan untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ravik Karsidi, "Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat",... hlm. 119.

<sup>28</sup> Yulianto Kadji, "Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya", <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, diakses tanggal 19 Mei 2019.

Melihat teori Korten diatas, maka masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Hal tersebut berarti bahwa, masyarakat memiliki kedudukan sebagai subyek pembangunan. Masyarakat tidak hanya sekedar menjadi penerima pasif layanan. Menurut Zamhariri seperti dikutip oleh Andi Nu Graha pada jurnal ekonomi modernisasi menyatakan bahwa dalam pembangunan masyarakat mengandung upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan rasa memiliki pada program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.<sup>29</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin sehingga masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelengguan.<sup>30</sup> Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sudah banyak dilakukan, bahkan sudah berkembang menjadi pemikiran maupun literatur.

Agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan tambahan pemahaman mengenai tahapan-tahapan pemberdayaan. Menurut Isbandi Rukminto Adi, tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat ada 7, antara lain sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan,

Tahap persiapan sekurang-kurangnya ada 2 tahapan yang harus dipersiapkan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan

---

<sup>29</sup> Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* Volume 5, Nomor 2, (Juni, 2009), hlm. 118.

<sup>30</sup> Ginandjar Kartasmitra, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cisendo, 1996), hlm 145.

petugas dalam hal ini tenaga pemberdaya masyarakat atau bisa dilakukan oleh *community worker*, dan penyiapan lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan pengkajian,

Tahap pengkajian dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat atau *key person*, atau melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Petugas yang berperan sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk pengkajian. Baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

c. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan,

Petugas yang berperan sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir mengenai masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh mereka.

d. Tahap performulasian rencana aksi,

Petugas yang berperan sebagai agen perubah membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan,

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program kegiatan.

f. Tahap evaluasi,

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

g. Tahap terminasi.

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas tetap harus keluar dari komunitas sasaran secara

perlahan-lahan dan tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasara.<sup>31</sup>

## 2. Konsep Program Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan ini sesuai dengan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang dimotori oleh BKKBN dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengendalian penduduk. Berikut penjabaran mengenai program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera:

### 2.1 Definisi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>32</sup> Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.<sup>33</sup> Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling

---

<sup>31</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LP FEUI, 2002), hlm. 182-196.

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/program>, diakses tanggal 21 Mei 2019.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1.

terikat, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.<sup>34</sup>

Sebuah program berisi tindakan yang diusulkan pemerintah yang dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan yang pencapaiannya problematis.<sup>35</sup> Kata “program” sendiri menegaskan perubahan (konversi) dari suatu hipotesis menjadi suatu tindakan pemerintah.<sup>36</sup> Sedang premis awal dari hipotesis tersebut telah disahkan, sedang derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat yang diharapkan (yang merupakan tahapan “selanjutnya”) disebut sebagai penerapan.<sup>37</sup> Penerapan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan program.

## 2.2 Aspek-aspek Program

Dalam buku yang berjudul praktek manajemen pemerintahan dalam negeri karya Manila, program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:<sup>38</sup>

1) Adanya tujuan kegiatan yang akan dicapai,

Tujuan merupakan hasil akhir dimana aktivitas organisasi diarahkan/ditunjukkan. Tujuan merupakan titik akhir dari fungsi perencanaan, pengorganisasioan, *staffing*, *leading*, dan

---

<sup>34</sup>Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 349.

<sup>35</sup>Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terj. Ricky Istamto, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 296.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 296.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 296.

<sup>38</sup>Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 43.

pengendalian. Tujuan merupakan rencana organisasi yang paling dasar. Organisasi secara keseluruhan mempunyai suatu tujuan.<sup>39</sup>

2) Adanya kegiatan-kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan,

Penulis mencoba melengkapi kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan, alternatif terbaik (paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.<sup>40</sup>

3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui,

Penulis mencoba melengkapi pengertian aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui menurut Mamduh M. Hanafi. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif, dan harus dilakukan, atau tidak dilakukan. Aturan merupakan bentuk rencana yang paling sederhana. Aturan mengharuskan tindakan tertentu yang spesifik dikerjakan, atau tidak dikerjakan, tergantung situasi yang dihadapi. Aturan berkaitan dengan prosedur karena aturan mengarahkan tindakan, tetapi tidak menyebutkan urutan waktu. Prosedur bahkan dapat dilihat sebagai rangkaian dari aturan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen*, cet 2 (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), hlm. 114.

<sup>40</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, cet 2 (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 79.

<sup>41</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen*,...hlm. 116.

Prosedur menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. Biasanya prosedur dijelaskan secara kronologis. Prosedur dapat ditemui di semua lapisan tingkatan manajemen, dan juga departemen atau bagian-bagian dalam organisasi. Prosedur yang bersifat umum berlaku untuk organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya dapat diturunkan ke prosedur yang lebih spesifik, yang berlaku untuk bagian yang lebih kecil, misal untuk divisi atau departemen. Prosedur merupakan penjelasan yang lebih rinci dari kebijakan organisasi.<sup>42</sup>

4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan,

Dalam bentuk yang paling mendasar sebuah anggaran adalah rencana bagi pemasukan dan pengeluaran uang.<sup>43</sup> Penganggaran adalah sebuah proses institusional terpisah dengan penjadwalan, struktur, dan perbendaharaannya tersendiri. Penganggaran selalu menjadi suatu hal yang penting bahkan menjadi pertanda khusus di tingkat nasional pada tahun-tahun terakhir. Suatu pemerintahan harus memutuskan apa yang ingin dilakukan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, dan bagaimana uang tersebut dapat diperoleh.<sup>44</sup>

5) Adanya strategi dalam pelaksanaan,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 116.

<sup>43</sup> Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*...hlm. 262.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

Dalam pengoperasian program ada tiga pilar aktivitas, yaitu:<sup>45</sup>

a) Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

b) Interpretasi

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan.

c) Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Sementara Charles O. Jones mengungkapkan salah satu aspek program, yaitu:

6) Evaluasi Program

Evaluasi pada dasarnya mengembalikan program ke pemerintahan guna dikaji. Pernyataan utama yang harus dijawab adalah: Apakah dampak dari program tersebut? Dan apakah dampak-dampak tersebut memang diinginkan?.<sup>46</sup>

Penulis mencoba melengkapi evaluasi program menurut Alkin. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 296.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 416.

menyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:

- a) *Sistem assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- b) *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- c) *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan?
- d) *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
- e) *Program certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.<sup>47</sup>

### 2.3 Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Sosial

---

<sup>47</sup>Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program*, cet 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 15.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera lewat berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif.<sup>48</sup> Awalnya UPPKS bernama UPPKA, yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Keanggotaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera terdiri dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi akseptor KB, keluarga pra sejahtera (keluarga miskin), keluarga sejahtera I, dan keluarga lain yang berminat.

Secara khusus tujuan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera antara lain: *Pertama*, menumbuhkan dinamika kelompok dengan mendorong anggota untuk dapat meningkatkan dan menetapkan kesertaan dalam ber KB, terutama kesertaan dalam pemakaian alat kontrasepsi yang efektif. *Kedua*, mengisi kegiatan ekonomi produktif kepada kelompok peserta KB sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut. *Ketiga*, mengembangkan kegiatan sosial ekonomi (khususnya para perempuan peserta KB) sehingga perannya meningkat baik dalam keluarga maupun masyarakat. *Keempat*, mendorong kemandirian kelompok dalam peningkatan ekonomi keluarga dengan melakukan usaha-usaha produktif. *Kelima*, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman anggota kelompok dalam organisasi maupun pengelolaan administrasi keuangan. *Keenam*, mendorong kelompok dalam memperoleh bantuan permodalan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> BKKBN, *Pembangunan Keluarga di Kampung KB*,...hlm. 42.

<sup>49</sup> [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/info\\_demografi\\_fix\\_2017.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/info_demografi_fix_2017.pdf), diakses tanggal 30 Agustus 2019.

Pengelolaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang harus dilakukan, yaitu: *pertama*, mengenali peluang pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat peluang produk yang dibutuhkan atau laku dijual, selain itu dengan cara mengenali potensi wilayah dan mempelajari keadaan pasar atau calon pembeli. *Kedua*, menentukan jenis usaha. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan kemudahan memperoleh bahan baku dari wilayah setempat, memperhatikan kemampuan di antara anggota kelompok, melihat kebutuhan dan daya beli masyarakat. *Ketiga*, menggalang modal usaha. Untuk menggalang modal usaha bisa dilakukan melalui iuran anggota, tabungan/simpanan anggota, sisa hasil usaha yang sudah berjalan dan melalui pinjaman dengan resiko kecil (Bank, BUMN, Swasta, dan sumber lain). *Keempat*, proses produksi. Menyelenggarakan produksi adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa yang akan dijual. *Kelima*, aktivitas pemasaran. Pemasaran adalah upaya untuk menyampaikan barang atau jasa yang diproduksi kepada pembeli. Usaha pemasaran tidak hanya ingin menjual barang atau jasa akan tetapi juga untuk mendapatkan laba. *Keenam*, pengelolaan administrasi dan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha kelompok. Kelengkapan administrasi dan buku catatan aliran keluar masuk keuangan kelompok akan turut menentukan keberhasilan dan kesinambungan usaha suatu kelompok. *Ketujuh*, menjalin kemitraan. Menjalinkan kemitraan bertujuan untuk memperkuat jaringan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 39-42.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memfasilitasi akses untuk mendapatkan bantuan modal usaha yang bersumber dari berbagai pihak antara lain sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a). APBN/APBD II
- b). Perbankan
- c). Pegadaian
- d). PT. PNM
- e). Sektor swasta/CSR
- f). PNPM
- g). DAMANDIRI
- h). PUNDI
- i). Koperasi

Syarat agar dapat memperoleh modal usaha tersebut, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera harus terdaftar dalam data basis kelompok Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.<sup>52</sup>

Syarat-syarat untuk pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Memiliki pengurus,
- b) Mengadakan pertemuan rutin,
- c) Melakukan usaha ekonomi produktif, mengadakan proses belajar usaha (tenaga terampil),
- d) Melakukan pencatatan administrasi,
- e) Anggota diutamakan pasangan usia subur, peserta KB dan Keluarga Pra-sejahtera,

---

<sup>51</sup>Suwondo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Sahabat" Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Skripsi (Semarang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm 44.

<sup>52</sup>*Ibid.*,

<sup>53</sup><https://keluargaindonesia.id/infografik/apa-syarat-pembentukan-kelompok-uppks> diakses pada 8 November 2019.

- f) Berkelompok, melakukan tanggung jawab bersama (tanggung jawab renteng).

Cara melakukan pembentukan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yaitu seorang inisiator (pemrakarsa) yang memiliki pengetahuan, keinginan atau modal dasar lainnya dan memiliki apresiasi terhadap kegiatan UPPKS, sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kader/PLKB mengumpulkan data potensi keluarga di desa atau lingkungan,
- b) Mengadakan pertemuan antar sesama anggota masyarakat,
- c) Mengadakan kesepakatan menyelenggarakan kegiatan UPPKS,
- d) Membentuk pengurus kelompok (pengurus inti kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, bila diperlukan dapat dibantu dengan dibentuk seksi-seksi).
- e) Menghubungi kepala desa untuk mendapat izin (SK Pembentukan Kelompok) persetujuan menyelenggarakan UPPKS,
- f) Memilih kelompok UPPKS,
- g) Mencari keterangan tentang kegiatan usaha yang akan menguntungkan dan memiliki pasar.<sup>54</sup>

### 3. Tingkat Kesejahteraan

#### 3. 1 Konsep Kesejahteraan

---

<sup>54</sup>BKKBN, *Pembangunan Keluarga di Kampung KB*,...hlm. 38.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>55</sup>

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan di mana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan.<sup>56</sup> Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual.<sup>57</sup>

Menurut James Midgley seperti yang dikutip oleh Miftachul Huda mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi syarat utama: (1) ketika masalah sosial dapat *dimenej* dengan baik, (2) ketika kebutuhan terpenuhi, (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.<sup>58</sup>

### 3. 2 Aspek-aspek Kesejahteraan

Menurut Koelle seperti yang dikutip oleh Bintarto kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan, dan sebagainya;

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 dan 2.

<sup>56</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

<sup>58</sup>Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt), hlm. 72.

<sup>59</sup>Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 111.

- 2) Dengan melihat kualitas dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

### 3.3 Indikator Kesejahteraan

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>60</sup>

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu:<sup>61</sup>

#### 1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*)

---

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>61</sup><http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses tanggal 16 Juni 2019.

## 2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga mampu memenuhi enam indikator KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu delapan indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga.

## 3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I dan delapan indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator kebutuhan pengembangan (*developmental needs*) dari keluarga.

## 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, dan lima indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga.

## 5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.

Tabel 4  
Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

| No. | Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera                              | Klasifikasi                               | Kriteria Keluarga Sejahtera                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Makan dua kali sehari atau lebih.                                 | Kebutuhan Dasar<br>( <i>Basic Needs</i> ) | a. Keluarga Sejahtera I.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari enam indikator |
| 2.  | Memiliki pakaian yang berbeda.                                    |                                           |                                                                                              |
| 3.  | Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik. |                                           |                                                                                              |
| 4.  | Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.  |                                           |                                                                                              |

|     |                                                                               |                                               |                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi.                             |                                               | KS I maka termasuk ke dalam keluarga Prasejahtera.                                                                                                  |
| 6.  | Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah.                            |                                               |                                                                                                                                                     |
| 7.  | Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.                      | Kebutuhan Psikologi<br>(Psychological Needs)  | a. Keluarga Sejahtera II.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari lebih delapan KS II maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera I.     |
| 8.  | Paling kurang sekali seminggu makan daging/ikan/telur.                        |                                               |                                                                                                                                                     |
| 9.  | Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.                |                                               |                                                                                                                                                     |
| 10. | Luas lantai rumah paling kurang 8 m <sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah. |                                               |                                                                                                                                                     |
| 11. | Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.                             |                                               |                                                                                                                                                     |
| 12. | Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.               |                                               |                                                                                                                                                     |
| 13. | Seluruh anggota keluarga umur 10-60 th bisa baca tulis latin.                 |                                               |                                                                                                                                                     |
| 14. | PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.                    |                                               |                                                                                                                                                     |
| 15. | Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.                             | Kebutuhan Pengembangan<br>(Development Needs) | a. Keluarga Sejahtera III.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari lima indikator KS III maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera II. |
| 16. | Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.       |                                               |                                                                                                                                                     |
| 17. | Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi.              |                                               |                                                                                                                                                     |
| 18. | Mengikuti kegiatan masyarakat.                                                |                                               |                                                                                                                                                     |
| 19. | Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah.                    |                                               |                                                                                                                                                     |
| 20. | Memberikan sumbangan materil secara teratur.                                  | Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Esteem)      | a. Keluarga Sejahtera III Plus.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS III Plus maka termasuk ke dalam KS III.         |
| 21. | Aktif sebagai pengurus organisasi.                                            |                                               |                                                                                                                                                     |

Sumber: [https://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/laporan-akhir-evaluasi-28-jan-1\\_20110512124617\\_1.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/laporan-akhir-evaluasi-28-jan-1_20110512124617_1.pdf), diakses tanggal 16 Juni 2019.

Melihat indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN diatas, jika di klasifikasikan ke dalam aspek-aspek kesejahteraan Koelle sebagai berikut:

Tabel 5  
Klasifikasi Indikator Keluarga Sejahtera Menurut Koelle

| No. | Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera                                          | Klasifikasi Menurut Koelle | Kriteria Keluarga Sejahtera BKKBN                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Makan dua kali sehari atau lebih.                                             | Aspek materi               | a. Keluarga Sejahtera I.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari enam indikator KS I maka termasuk ke dalam keluarga Prasejahtera.     |
| 2.  | Memiliki pakaian yang berbeda.                                                | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 3.  | Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.             | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 4.  | Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.              | Aspek fisik                |                                                                                                                                                     |
| 5.  | PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi.                             | Aspek fisik                |                                                                                                                                                     |
| 6.  | Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah.                            | Aspek mental               |                                                                                                                                                     |
| 7.  | Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.                      | Aspek spiritual            | a. Keluarga Sejahtera II.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari lebih delapan KS II maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera I.     |
| 8.  | Paling kurang sekali seminggu makan daging/ikan/telur.                        | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 9.  | Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.                | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 10. | Luas lantai rumah paling kurang 8 m <sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah. | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 11. | Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.                             | Aspek fisik                |                                                                                                                                                     |
| 12. | Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.               | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 13. | Seluruh anggota keluarga umur 10-60 th bisa baca tulis latin                  | Aspek mental               |                                                                                                                                                     |
| 14. | PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.                    | Aspek fisik                |                                                                                                                                                     |
| 15. | Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.                             | Aspek spiritual            | a. Keluarga Sejahtera III.<br>b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari lima indikator KS III maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera II. |
| 16. | Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.       | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 17. | Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi.              | Aspek materi               |                                                                                                                                                     |
| 18. | Mengikuti kegiatan masyarakat.                                                | Aspek mental               |                                                                                                                                                     |
| 19. | Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah.                    | Aspek mental               |                                                                                                                                                     |

|     |                                              |                 |                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Memberikan sumbangan materil secara teratur. | Aspek spiritual | a. Keluarga Sejahtera III Plus.                                                                          |
| 21. | Aktif sebagai pengurus organisasi.           | Aspek spiritual | b. Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS III Plus maka termasuk ke dalam KS III. |

Sumber: Olahan Penulis, diolah 2019.

### F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>62</sup> Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>63</sup> Berdasarkan dari latar belakang masalah, rumusan masalah hingga landasan teori di atas, maka penulis merumuskan hipotesisi penelitian sebagai berikut:

$H_o$  : Tidak ada hubungan antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan anggota kelompok.

$H_a$  : Ada hubungan antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan anggota kelompok.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Berikut kelima bab tersebut, yaitu:

<sup>62</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, cet.28 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 84.

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9

BAB I, yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu metode penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi konseptual, definisi oprasional, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan analisis data.

BAB III, yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini berisi mengenai penjelasan lokasi penelitian mulai dari letak geografis, kondisi geografis, serta hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.

BAB IV, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, yaitu hubungan antara pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan tingkat kesejahteraan anggota kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

BAB V, yaitu penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian dari data yang diinterpretasikan pada bab sebelumnya secara singkat. Sedangkan saran ditujukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” sebagai berikut:

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Korten yaitu, *pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan Pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. *Kedua*, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. *Ketiga*, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Hal ini di didasarkan pada penghitungan yang dibantu dengan aplikasi IBM SPSS *Statistic* versi 22 yang menyatakan bahwa signifikasi sebesar  $0.000 < 0.05$ . Selain itu, nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel.  $t$  hitung dalam penelitian ini sebesar 0.448 lebih besar dari  $t$  tabel yaitu 0.220.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Heri Risal Bungkaes dkk pada Tahun 2013 dengan judul

*“Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud”*. Penyebab penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya karena hasil penelitian sebelumnya memiliki hubungan yang sangat signifikan antara efektivitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima Raskin pada taraf uji 1% atau taraf kepercayaan 99%.

Selanjutnya, hasil penelitian ini sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Deni Kutut Megantara pada Tahun 2007 dengan judul *“Hubungan Antara Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kab. Lumajang Tahun 2006.”* Penelitian ini sesuai karena pada penelitian yang dilakukan oleh Deni Ketut Megantero ada hubungan antara program pembinaan kesejahteraan keluarga dengan pelaksanaan program keluarga berencana diperoleh nilai sebesar 0.666 yang menunjukkan nilai lebih besar dari nilai  $r$  tabel.

Dari kedua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat mendukung penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya meneliti mengenai suatu program dengan tingkat kesejahteraan penerima manfaat dari program tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memiliki saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. penulis juga berharap PLKB dapat membentuk dan membimbing kelompok-kelompok UPPKS lebih banyak lagi agar masyarakat yang belum sejahtera dapat lebih sejahtera.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih fokus pada evaluasi program, bagaimana pelaksanaan program UPPKS agar mendapat pernyataan dan harapan dari anggota kelompok terhadap program UPPKS.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Azwar, Saifuddin, *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Adi, Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: LP FEUI, 2002.

Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

BKKBN, *Pembangunan Keluarga di Kampung KB*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, *Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)*, Yogyakarta: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), 2019).

Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

- EQ, Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Gunawan, Imam, *Pengantar Statistik Inferensial*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hanafi, Mamduh M, *Manajemen*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.
- Jones, Charles. O, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terj. Ricky Istamto, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Martono , Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ridwan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian Administrasi Pendidikan, Bisnis, Pemerintahan, Sosial, Kebijakan, Ekonomi, Hukum Manajemen, Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudaryono, *Aplikasi Statistika untuk Penelitian*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Suharsaputra ,Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Rafika Aditama, 2012.

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suparlan, Persudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Tayibnapis, Farida Yusuf, *Evaluasi Program*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Winarsunu, Tulus, *Statistika dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*, Malang: UMM Press, 2009.

#### **Internet**

BPS, 1970-2017, Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 1970-2017.  
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>, diakses tanggal 10 April 2019.

BPS Sleman, 2014, Banyaknya Kepala Keluarga dan Keluarga Miskin per Kecamatan di Kabupaten Sleman 2014.  
<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/01/03/54/banyaknya->

kepala-keluarga-dan-keluarga-miskin-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2014.html, diakses tanggal 4 Mei 2019.

Yulianto Kadji, 2013, “Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya”,  
<http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, diakses tanggal 19 Mei 2019.

KBBI, tt, program, <https://kbbi.web.id/program>, diakses tanggal 21 Mei 2019.

BKKBN, 2017, [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/info\\_demografi\\_fix\\_2017.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/info_demografi_fix_2017.pdf) , diakses tanggal 30 Agustus 2019.

BKKBN, 2017, Apa Syarat Pembentukan Kelompok UPPKS?,  
<https://keluargaindonesia.id/infografik/apa-syarat-pembentukan-kelompok-uppks>, diakses pada 8 November 2019.

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses tanggal 16 Juni 2019

### **Undang-undang.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

### **Skripsi dan Jurnal**

Bungkaes, Heri Risal dkk, “*Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan*

- Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*”, *Journal Acta Diurna*, April, 2013.
- Dewi, Intan Riana, *Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Imrah, Khoirul, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi, Lampung: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Intan, 2018.
- Megantara, Deni Kutut, *Hubungan Antara Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga dengan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kab. Lumajang Tahun 2006*, Skripsi , Jawa Timur: Program Studi Pendidikan Luarr Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2007.
- Nurhusni, Siti Aghnia dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Volume 4 Nomor 1*, 1 Juni 2019.
- Pewista, Ika, *Hubungan Peran Kelompok Tani dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Lansia di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon*

*Progo*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Kependudukan Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Sudarmiani dan Waini Astuti, “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”, *Journal Equilibrium* Volume 7 Nomor 2, 2 Juli 2019.

Suwondo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) “Sahabat” Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Skripsi, Semarang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Semarang, 2017.

